



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN

(Studi Kasus di Desa Dadap – Indramayu)

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sarjana (S.Sy)
Pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam
Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon**



Disusun oleh :

Merlian Yulistriani

NIM: 59320148

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON**

2013



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap – Indramayu)

Desa Dadap merupakan salah satu desa pantai yang ada di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Sebagai salah satu desa pantai dengan potensi sumber daya laut yang besar di Kabupaten Indramayu, maka mayoritas penduduk Desa Dadap menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Melihat potensi yang besar dari sektor perikanan di Indramayu, maka Pemerintah Daerah membangun sarana Pelabuhan Perikanan yang terletak di Desa Dadap yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun dalam perkembangannya pelabuhan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para nelayan. Hal tersebut dihadapkan oleh rendahnya kualitas SDM khususnya para nelayan setempat. Selain itu, masyarakat nelayan di Desa Dadap merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dari latar belakang tersebut, maka perlu adanya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat nelayan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke tempat penelitian, wawancara mendalam dengan beberapa responden inti, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui peningkatan derajat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kesejahteraan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN (Studi kasus di Desa Dadap – Indramayu)”, oleh Merlian Yulistriani, NIM. 59320148, telah diujikan dalam sidang munaqasah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 30 Mei 2013


Sidang Munaqasah

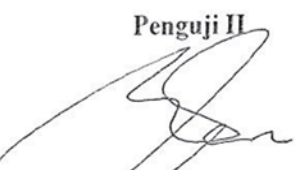
**Ketua,
 Merangkap Anggota**

Sri Rokhmawati, SE., M.Si
 NIP. 19730806 199903 2 003

**Sekretaris,
 Merangkap Anggota**

Dr. Aan Jaelani, M.Ag
 NIP. 19750601 200501 1008

Penguji I

Dr. Aan Jaelani, M.Ag
 NIP. 19750601 200501 1008

Penguji II

Eef Saefulloh, M.Ag
 NIP. 19760312 200312 1003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Semesta bertasbih memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya bagi semesta alam termasuk bagi penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap - Indramayu)”**, dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Sholawat serta salam tak lupa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan sepanjang zaman. Seorang Rasul yang menjiwai setiap aspek kehidupan. Seorang pemimpin yang amanah, pejuang yang gigih dan saudagar yang sukses. Semoga Allah senantiasa memberkahi Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sepanjang zaman.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Mamah dan Papah, atas doa yang akan senantiasa menyertai di setiap perjalananku meraih sukses.
2. Bapak Dr. H. Maksum Mukhtar, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Bapak Dr. Achmad Kholik, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
4. Ibu Sri Rokhlinasari, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Dr. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan arahan serta masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dewi Fatmasari SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga senantiasa membimbing dan memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang telah mengajarkan banyak hal baik ilmu, nasehat, maupun motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
8. Bapak HD Sofa Nasman selaku Kepala Desa Dadap, Bapak Bukhori, serta seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Kasiwan selaku manager TPI-Dadap, Bapak Fachrurrozi, Bapak Asyriqin, serta masyarakat nelayan Desa Dadap yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Om Kusno beserta keluarga besar yang senantiasa membantu, mendukung dan mendoakan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

11. Roziqi Hamdi S.Pd atas bantuan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku serta teman-teman MEPI 2 angkatan 2009.
13. Seluruh teman-teman MEPI dan Mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
14. Mas Dedi beserta seluruh staff tata usaha Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
15. Serta seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Atas bantuan serta partisipasi seluruh pihak dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Penulis hanya mampu memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, mudah-mudahan budi baik dan bantuan semua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis berharap, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semuapihak.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Cirebon, Mei 2013

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTO HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB II PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN.....	15
A. Pemerintah Daerah	15
A.1. Pengertian Pemerintah Daerah	15
A.2. Sistem Otonomi daerah.....	19
A.3. Fingsi dan Peran Pemerintahan	21
B. Kesejahteraan.....	25
B.1. Pengertian Kesejahteraan.....	25
B.2. Konsep Kesejahteraan daslsm Kebijakan Sosial	29
B.3. Indikator Kesejahteraan	34
B.4. Kesejahteraan dan Kemiskinan.....	35
B.5. Pandangan Islam Mengenai Konsep Kesejahteraan Masyarakat	37
C. Pengertian Masyarakat Nelayan	41
C.1. Pengertian Masyarakat.....	41
C.2. Konsep Nelayan	42
C.3. Kehidupan Sosial Masyarakat nelayan	45
C.4. Strategi Perekonomian Keluarga Nelayan	49
C.5. Pembangunan Perekonomian Desa Nelayan	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan Penelitian.....	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
C. Teknik Pengumpulan Data	57
D. Teknik Analisis Data	58
E. Uji Keabsahan Data	60



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV	ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A.	Gambaran Umum Tempat Penelitian	62
A.1.	Keadaan Geografis.....	62
A.2.	Kependudukan dan Pola Pemukiman	64
A.3.	Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu	66
B.	Hasil dan Pembahasan	73
B.1.	Gambaran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan.....	73
B.2.	Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	82
B.3.	Upaya Masyarakat Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.....	98
BAB V	PENUTUP	100
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan sebuah Negara terbentuk adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dijelaskan dalam pasal 1 bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹

Kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakatnya. Dalam lingkup masyarakat pesisir kegiatan perekonomiannya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya laut. Kebanyakan dari masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai mata

¹ Dikutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012

pencahariannya sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya laut yang besar di Indonesia. Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu memiliki panjang pantai 114 km dengan kewenangan 4 mil laut (MSY/mean sustainable yield : 49.395 ton), memiliki 3 gugusan pulau-pulau kecil (Pulau Biawak, Pulau Gosong dan Pulau Candikian), Menurut LAPAN (2006) Areal yang sesuai untuk Tambak 39.911,60 Ha (Produk Potensial 142.819 ton), Areal untuk Budidaya Air Tawar / Kolam 25.000 Ha (Produk potensial 125.000 ton), Areal untuk Mina Padi 16.000 Ha (Produk potensial 52.000 ton), Perairan Umum 1.966 Ha (Produk potensial 6.000 ton), dan Areal untuk budidaya laut 752,57 Ha di Pulau Biawak, P. Gosong dan Pulau Candikian (Produk Potensial 13.116 ton). Potensi pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Indramayu berada pada 12 kecamatan wilayah pesisir, yang didukung oleh kegiatan pelelangan ikan di TPI/PPI sebanyak 14 TPI/PPI, dengan jumlah serapan tenaga kerja kegiatan perikanan dan kelautan tahun 2011 sebanyak 86.895 orang yang terdiri dari 38.553 orang nelayan laut dan juragan, 4.760 orang pencari ikan di perairan umum, 18.632 orang pembudidaya ikan di tambak, 10.407 orang pembudidaya ikan di kolam, 10 orang pembudidaya di laut, 5.869 orang pengolah produk perikanan, dan 1.205 orang bakul/pedagang ikan serta 7.459 orang penggarap garam rakyat.²

² Dikutip dari data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu tahun 2011



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu tahun 2010 sebanyak 11.707 nelayan tersebar di wilayah Kec. Juntinyuat yang terdiri dari 861 pemilik perahu dan 10.846 sebagai buruh atau nelayan kecil.³ Dari jumlah tersebut jika di bandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Indramayu, Kec. Juntinyuat merupakan wilayah dengan jumlah nelayan kecil terbesar di Indramayu. Hal tersebut didukung dengan wilayah yang dekat pantai yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakatnya khususnya di desa dadap yang merupakan salah satu desa di kecamatan juntinyuat yang wilayahnya sebagian besar merupakan kawasan pesisisir dengan mayoritas penduduknya sebagian nelayan.

Tabel 1.1. Banyaknya Nelayan Menurut Status Nelayan di Kabupaten Indramayu Tahun 2010

KECAMATAN	STATUS NELAYAN		JUMLAH
	Pemilik (RTP)	Buruh (RTBP)	Pemilik (RTP)
HAURGEULIS	0	0	0
GANTAR	0	0	0
KROYA	0	0	0
GABUSWETAN	0	0	0
CIKEDUNG	0	0	0
TERISI	0	0	0
LELEA	0	0	0
BANGODUA	0	0	0
TUKDANA	0	0	0
SUKAGUM	0	0	0
KERTASEMAYA	0	0	0
WIDASARI	0	0	0
KERTASEMAYA	0	0	0
SUKAGUMIWANG	0	0	0
KRANGKENG	0	0	0
KARANGAMPEL	72	722	794

³Dikutip dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, "Juntinyuat dalam Angka 2011".



KEDOKANBUNDER	0	0	0
JUNTINYUAT	861	10.846	11.707
SLIYEG	0	0	0
JATIBARANG	0	0	0
BALONGAN	122	706	828
INDRAMAYU	0.043	6.687	7.73
SINDANG	166	962	1.128
CANTIGI	420	1.542	1.926
PASEKAN	210	845	1.057
LOHBENER	0	0	0
ARAHAN	0	0	0
LOSARANG	204	965	1.169
KANDANGHAUR	1.394	8.521	9.915
SUKRA	0	0	0
ANJATAN	0	0	0
BONGAS	113	501	614
PATROL	121	495	616
TAHUN 2010	4.726	32.792	37.484
TAHUN 2008	4.834	32.538	37.372
TAHUN 2009	4.283	31.124	35.047

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu

Melihat potensi yang cukup besar dari sektor perikanan di Kabupaten Indramayu akhirnya pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Indramayu membangun sarana infrastruktur berupa pelabuhan perikanan Dr. Ir. Soenarno Dipl HE yang didirikan di desa Dadap Kec. Juntinyuat yang diharapkan mampu menjadi sarana dalam mengembangkan potensi perikanan di Kabupaten Indramayu di tingkat Jawa Barat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indramayu khususnya masyarakat nelayan yang tinggal di desa Dadap yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Namun dalam perkembangannya pelabuhan tersebut mengalami kemunduran yang signifikan. Bahkan dapat dikatakan *mati suri* sehingga pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar pelabuhan tersebut jauh dari harapan. Menurut data BPS

Kabupaten Indramayu Tahun 2011 jumlah keluarga pra sejahtera di Desa Dadap mencapai 24,3 % dari 4861 keluarga yang ada atau sekitar 18,5 % dari total keluarga prasejahtera yang ada di kecamatan Juntinyuat. Jika dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kec. Juntinyuat, desa dadap memiliki tingkat kesejahteraan yang masih rendah.⁴

Dari hasil pra observasi yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2013, mayoritas penduduk di Desa Dadap bekerja sebagai nelayan yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Hal tersebut dihadapkan pada kondisi masyarakat nelayan yang mayoritas adalah nelayan perahu kecil yang kurang diberdayakan, keberadaan KUD yang tidak berjalan, serta kurangnya peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan mediator bagi masyarakat nelayan dalam mengembangkan potensi perikanan di daerah tersebut.

Menurut Fachrurrozi selaku tim asistensi TPI-Dadap, menjelaskan bahwa :

Kondisi pantai yang mengalami pendangkalan yang cukup parah dikarenakan sudah cukup lama tidak dilakukan pengerukan. Hal tersebut menghambat aktivitas melaut sehingga perahu besar sulit untuk merapat ke dermaga, akibatnya kegiatan pelelangan di TPI tersebut kian sepi. Selain itu, tidak berjalannya KUD Ngupaya Mina menjadikan para nelayan beralih ke tengkulak untuk memperoleh pinjaman modal dan mereka diharuskan menjual hasil tangkapan mereka ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang mereka peroleh jika dilelang di TPI. Keberadaan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan tersebut juga kurang mendapat perawatan dari pihak pemerintah daerah sehingga kondisinya rusak. Padahal tempat tersebut selain sebagai pelabuhan bisa dijadikan sebagai objek wisata yang mendatangkan sumber pendapatan daerah yang selayaknya mampu

⁴ Dikutip dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, "Juntinyuat dalam Angka 2012".



memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya terutama para nelayan.⁵

Dengan demikian peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi akses informasi teknologi, modal dan pemasaran hasil tangkapan ikan bagi para nelayan di daerah tersebut. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: *Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi kasus di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Dadap?
2. Apa peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat nelayan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Dadap
2. Mengetahui peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat nelayan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Fachrurozi, tanggal 5 Januari 2013.



D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait :

1. Manfaat bagi lembaga, diantaranya :
 - a. Dapat memperkenalkan potensi perikanan dan pola perekonomian masyarakat Nelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
 - b. Memberikan wawasan mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
2. Manfaat bagi akademik, diantaranya :
 - a. Sebagai bahan referensi dalam pembelajaran khususnya dalam hal perekonomian berbasis kerakyatan.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Manfaat bagi peneliti, diantaranya :
 - a. Peneliti dapat mengetahui tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
 - b. Peneliti dapat mengetahui potensi alam yang dimiliki Kabupaten Indramayu yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya..

E. Penelitian Terdahulu



Setelah melalui penelusuran beberapa skripsi yang memiliki keterkaitan judul dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dari penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

Dalam skripsi Maharani Adi Cahyadi yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bagi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan)* yang ditulis pada tahun 2006, menyatakan bahwa peranan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kegiatan para nelayan diwujudkan melalui kebijakan Pemerintah Daerah Lamongan yang termuat dalam Keputusan Bupati nomor 04 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 50 tahun 2000 tentang retribusi pasar grosir penyelenggaraan pelelangan ikan. Isi dari Keputusan tersebut adalah untuk kesejahteraan nelayan, untuk menyelenggarakan keputusan tersebut tersedia sumber daya manusia serta sarana dan pra sarana yang cukup. Dalam keputusan Bupati tersebut juga menjelaskan besarnya tarif retribusi mulai dari pungutan sampai pada penggunaannya. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peranan pemerintah daerah melalui kebijakan yang termuat dalam Keputusan Bupati nomor 04 tahun 2003 sebenarnya sudah dilaksanakan, tetapi kebijakan tersebut dianggap masih kurang efektif.

Dalam skripsi Sony Abner Damamain yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Rumput Laut (Studi Kasus*



Budi Daya Rumput Laut di Desa Sathean) yang ditulis pada tahun 2012, menyatakan bahwa peranan Pemerintah daerah dalam program pemberdayaan budidaya rumput laut yang digulirkan oleh Pemerintah daerah lewat dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dapat dikatakan belum efisien karena masih terdapat kendala-kendala di lapangan seperti masalah stabilisasi harga, masalah hama, masalah tempat penampungan pasca panen serta masalah pemberian bantuan perahu. Program pemberdayaan rumput laut ini dapat berjalan dengan baik dari input dan outputnya maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan daerah terkait dengan penentuan harga rumput laut sehingga para petani tidak dirugikan oleh para pembeli maupun industri –industri terkait, peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan bagi para petani terkait dengan teknis budidaya rumput laut, harus ada kontrol dan evaluasi dari dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga program tersebut bisa berjalan lebih maksimal, serta harus ada penembahan paket bantuan bagi kelompok budidaya yang sudah dibentuk.

Dalam skripsi Hj. Eva Fajriyah yang berjudul *Tanggapan Nelayan Terhadap Upaya Kantor Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Nelayan (Studi tentang peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)* yang ditulis pada tahun 2006, menyatakan bahwa

F. Kerangka Pemikiran

Desentralisasi kewenangan pemerintah yang diberikan pusat pada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengertian otonomi daerah dimaknai sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam kaitannya mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu tidak terlepas dari wewenang pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan.⁷ Pemerintah mempunyai peran dalam perekonomian berkaitan dengan penyediaan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti pertahanan dan keamanan, jalan raya, pelabuhan, pendidikan dan kesehatan. Untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana tersebut, pemerintah mendapatkan dana dari masyarakat berupa pajak.

Dengan demikian Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Peranan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah disamping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumberdaya alam akan sangat menentukan kekuatan dari APBD.⁸

⁶ Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 42

⁷ Suparmoko, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 15

⁸ Suparmoko, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 17



Secara tradisi, kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan atau perawatan sosial personal. Kelima bidang tersebut biasanya diorganisir oleh lembaga pemerintah atau departemen, seperti departemen kesejahteraan sosial, departemen pendidikan, departemen kesehatan atau oleh badan-badan khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang.⁹

Kebijakan sosial sangat erat kaitannya dengan konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan biasa diartikan baik sebagai sebuah teori atau pendekatan, maupun sebagai sebuah sistem mengenai bagaimana kebijakan sosial diaplikasikan. Para ahli seringkali menyebutkan bahwa kebijakan sosial pada dasarnya merupakan studi mengenai Negara kesejahteraan dan sistem pelayanan sosial. Dibanyak negara yang menganut sistem negara kesejahteraan, kebijakan sosial diwujudkan kedalam berbagai program pemerintah melalui skema-skema perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).¹⁰

Dalam konteks pembangunan nasional, maka pembangunan kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerja sosial, yang

⁹ Edi Suharto, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 14-15

¹⁰*Ibid.*, hlm. 56



pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam bentuk manifestasinya. (Jones dalam Suharto, 2006a).

Abu Yusuf, faqih abad ke-2, dalam bukunya, *kitab Al-Kharaj*, menganjurkan khalifah Harun Al-Rasyid:

Perhatikanlah apa yang telah diamanatkan Allah padamu dan tugas kekuasaan yang diamanatkan kepadamu.

Abu Yusuf juga menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dan proyek rakyat demi kesejahteraan umum. Ketika menasehati Harun, ia mengatakan:

Penguasa bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan harus melakukan segala sesuatu karena ia menganjurkan kebaikan bagi mereka.

Dalam karyanya ini Abu Yusuf selalu menekankan pentingnya kebijakan seperti itu sehingga dapat menjamin kesejahteraan rakyat, dan sebagai sandarannya ia mengutip pernyataan khalifah Umar yang ditujukan ke salah seorang gubernurnya, Abu Musa al-Asyari :

Sebaik-baik manusia yang berkuasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah rakyatnya malah menemui kesulitan.

Dari pernyataan diatas jelaslah bahwa, menurut para pemikir Islam, sumber-sumber kekuasaan negara dianggap sebagai amanat dan harus dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hakikat kesejahteraan dalam negara Islam bukan hanya memiliki tujuan ekonomi, tapi juga menjadi tujuan *syar'i* bagi negara Islam. Dalam hal ini, para fuqaha berpendapat bahwa terpenuhinya kebutuhan rakyat adalah kewajiban sosial (*fardh kifayah*). Dengan demikian, tujuan negara adalah menjalankan persyaratan berupa terpenuhinya



kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kewajiban sosial umumnya berkaitan dengan kepentingan rakyat. Mengabaikan kewajiban itu berarti telah menzalimi mereka.¹¹

Menurut Kusnadi (2002), ciri umum yang dapat dilihat dari kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat nelayan adalah fakta-fakta yang bersifat fisik berupa kualitas pemukiman. Kampung-kampung nelayan miskin akan mudah diidentifikasi dari kondisi rumah hunian mereka. Rumah-rumah yang sangat sederhana, berdinding anyaman bambu, berlantai tanah berpasir, beratap daun rumbia, dan keterbatasan pemilikan perabotan rumah tangga adalah tempat tinggal para nelayan buruh atau nelayan tradisional. Sebaliknya, rumah-rumah yang megah dengan segenap fasilitas yang memadai akan mudah dikenali sebagai tempat tinggal pemilik perahu, pedagang perantara atau pedagang berskala besar dan pemilik toko.¹²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri atas :

Dalam bab 1, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Dalam bab 2, menjelaskan mengenai teori yang berhubungan dengan pemerintah daerah, teori tentang kesejahteraan, serta teori tentang masyarakat

¹¹ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan, dan Peran Bait al-Mal*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 60

¹² Abdul Mugni, *Strategi Rumah tangga Nelayan Dalam Mengatasi Kemiskinan*, 2006, hlm. 17



nelayan. Teori – teori tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan teori bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Dalam bab 3, menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, terkait dengan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data yang digunakan, serta uji keabsahan data.

Dalam bab 4, menjelaskan mengenai kondisi objektif tempat penelitian, serta pembahasan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.

Dalam bab 5, merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan disertai dengan saran-saran yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Dadap Kec. Juntinyuat.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi,Sabahuddin.2005. *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik,Konsep Perpajakan, dan Peran Bait al-Mal*.Bandung: Nuansa.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, *Juntinyuat dalam Angka 2012*.
- Chapra, Umer.2000.*Islam dan Pembangunan Ekonomi*.Jakarta:Gema Insani Press.
- Haris, Syamsuddin.2007.*Desentralisasi dan Otonomi Daerah:Desentralisasi, Demokratisasi &Akuntabilitas Pemerintah Daerah*.Jakarta: LIPI.
- Kusnadi.2007.*Jaminan Sosial Nelayan*.Yogyakarta: LKiS.
- Kusnadi.2007.*Perempuan Pesisir*.Yogyakarta: LKiS.
- Labolo, Muhadam .2006.*Memahami Ilmu Pemerintahan:Suatu Kajian, Teori, Konsep,dan Pengembangannya*.Jakarta: Grafindo.
- Marbun SH.1988.*Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Moeliono, Moira, Dkk.2007.*Menuju Kesejahteraan : Pemantauan Kemiskinandi Malinau,Indonesia*.Bogor : Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Moleong, Lexy J.2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Remaja RosdaKarya.
- Mugni, Abdul.2006.*Strategi Rumah tangga Nelayan Dalam Mengatasi Kemiskinan*. Bogor:IPB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Nasrul Effendy, *Dasar-dasar Keperawatan Masyarakat*,

http://books.google.co.id/books?id=KPBNrqVNJIUC&pg=PA89&dq=definisi+masyarakat&hl=en&sa=X&ei=up-aUdmUFMfprQegs4DICA&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi%20masyarakat&f=false.

Penelitian Kualitatif, http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif

Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung:Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

Pracoyo,Tri Kunawangsih dan Antyo Pracoyo.2007.*Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*.Jakarta:Grasindo.

Sabarno, Hari.2008.*Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*.Jakarta: Sinar Grafika.

Sihombo, Marhaeni Ria.2010.*Hukum Perikanan Nasional dan International*.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Soesastro, Hadi, Dkk. 2005.*Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesiadalam SetenganAbad Terakhir*.Yogyakarta: Kanisius.

Suharto, Edi.2008.*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*.Bandung: Alfabeta.

Sunarno, Siswanto.2009.*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:SinarGrafika.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Suparmoko.2002.*Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan*

Daerah.Yogyakarta:Andi Offset.

Yunus, Mahmud.2004. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Zaky, Abdullah.2003.*Ekonomi dalam Perspektif Islam*.Bandung : Pustaka Setia.